

KESENJANGAN ANTARA NILAI PANCASILA DENGAN REALITAS ETIKA DALAM KONDISI POLITIK INDONESIA MASA KINI

Alfred Benu¹, Matilda Beatrix Klobong², Dina Sepriani Lasa³, Priska Mariany Ratu
Rihi⁴, Roberta Yulianti Ndori⁵, Novrinda Nadia Fahik⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang

[¹klobongalda@gmail.com](mailto:klobongalda@gmail.com)

ABSTRACT

Pancasila is the foundation of the state, the national ideology, and the ethical guideline for national and state life. However, in contemporary Indonesian political practice, a significant gap remains between the ideal values of Pancasila and the reality of political behavior. Phenomena such as corruption, money politics, polarization, hate speech, and abuse of power demonstrate the weak internalization of Pancasila values within the political system. This article aims to analyze the forms of this gap, its causes, and its implications for the quality of Indonesian democracy. This research uses a qualitative approach through a literature review. The results indicate that the gap arises from a weak ethical political culture, inconsistent law enforcement, low elite role models, and the strengthening of pragmatic politics. Efforts to strengthen Pancasila political ethics need to be carried out through character education, political party reform, and just law enforcement.

Keywords: *political ethics, pancasila, indonesian politics*

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, sekaligus pedoman etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktik politik Indonesia masa kini, masih terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara nilai-nilai ideal Pancasila dan realitas perilaku politik. Fenomena seperti korupsi, politik uang, polarisasi, ujaran kebencian, serta penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan lemahnya internalisasi nilai Pancasila dalam sistem politik. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk kesenjangan tersebut, faktor penyebabnya, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan terjadi akibat lemahnya budaya politik etis, inkonsistensi penegakan hukum, rendahnya keteladanan elite, serta penguatan politik pragmatis. Upaya penguatan etika politik Pancasila perlu dilakukan melalui pendidikan karakter, reformasi partai politik, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: etika politik, pancasila, politik indonesia

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi nasional berfungsi sebagai pedoman moral, etika, politik dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (*PANCASILA PEDOMAN MORAL DAN SISTEM FILSAFAT BANGSA | JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, n.d.) . Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memuat prinsip-prinsip universal mengenai penghormatan terhadap martabat manusia, penguatan persatuan nasional, praktik demokrasi yang bermusyawarah, serta tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Fadlail, 2024).

Pancasila dirancang untuk menjadi rujukan normatif dalam setiap proses pengambilan keputusan politik, pembentukan kebijakan publik, dan perilaku aktor politik (*Ilmu Politik & Kebijakan Publik - Mohamad Steven Alim - Google Buku*, n.d.).

Perkembangan politik Indonesia masa kini memperlihatkan banyak fenomena yang menunjukkan penyimpangan dari nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila. Maraknya praktik politik uang, munculnya fenomena politik identitas,

meningkatnya polarisasi sosial, serta masih berlangsungnya praktik korupsi politik merupakan indikator bahwa internalisasi nilai Pancasila belum berjalan optimal (M.Pd, 2025).

Dinamika politik pasca-reformasi memberikan ruang yang luas bagi kebebasan politik, tetapi kondisi tersebut juga menciptakan peluang bagi berkembangnya praktik-praktik politik yang pragmatis, transaksional, tidak mencerminkan nilai etika politik yang ideal .

Fenomena ini menggambarkan adanya problem struktural dan kultural dalam sistem politik Indonesia. Struktur politik yang masih dipengaruhi kepentingan oligarki, lemahnya pengawasan institusional, serta budaya politik yang cenderung mementingkan kepentingan jangka pendek sering kali menghambat terwujudnya politik berlandaskan nilai Pancasila (*DEMOKRATISASI DAN TANTANGAN POLITIK IDENTITAS DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA KONTEMPORER | Jurnal Intelek Insan Cendikia*, n.d.).

Pola perilaku politik yang terbentuk kemudian mencerminkan dominasi kepentingan kekuasaan, bukan kepentingan publik. Situasi ini berkontribusi pada menurunnya

kualitas demokrasi, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik, serta semakin lebarnya jurang antara nilai ideal Pancasila dan realitas politik nasional (*Analisis Penyebab Terjadinya Politik Uang Pada Pemilu Pasca Reformasi Dalam Perspektif Ekonomi Politik, Hukum, Dan Budaya | Ilmu Dan Budaya*, n.d.)

Urgensi penelitian mengenai kesenjangan antara nilai Pancasila dan realitas etika politik menjadi semakin kuat seiring meningkatnya tantangan dalam menjaga integritas sistem politik Indonesia (*AKADEMIKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, n.d.). Analisis kritis terhadap faktor-faktor penyebab kesenjangan diperlukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, baik yang bersumber dari lingkungan politik, budaya masyarakat, maupun perilaku elite.

Pemahaman yang komprehensif mengenai kesenjangan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk merumuskan strategi pembenahan etika politik yang lebih efektif (*Sosiologi Masalah Sosial: Teori, Analisis, Dan Praktik Penanggulangan - Oman Sukmana, Gusti Pirandy, Sari Viciawati*

Machdum, Dwi Wulan Pujiriyani, Ciek Julyati Hisyam, Berlianti Berlianti, Fritz Hotman S. Damanik, Mazdalifah Mazdalifah, Nadya Kharima, Aldian Hudaya, Ronald Helweldery, Siti Napsiyah, Husni Thamrin, Sulthon Abdillah Muhammad, M. Akil Deston Silitonga, Sri Wahyuni, Endang Surjati, Hairani Siregar, Anna Sakreti Nawangsari, Asep Jahidin, MSi, Ni Luh Putu Maitra Agastya, Afra Afifah - Google Buku, n.d.).

Penelitian ini memiliki relevansi teoritis dan praktis. Relevansi teoritis terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian tentang etika politik dan implementasi Pancasila dalam era demokrasi modern. Relevansi praktis berkaitan dengan penyediaan rekomendasi strategis untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik, termasuk pada aspek pendidikan politik, perbaikan regulasi, serta pembentukan budaya politik yang lebih berkeadaban. Pemerintah, lembaga politik, dan masyarakat membutuhkan pemahaman akademik yang mendalam untuk membangun sistem politik yang lebih etis dan berorientasi kepentingan rakyat.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan fokus utama pada jurnal ilmiah yang memuat pembahasan mengenai nilai Pancasila serta realitas etika politik masa kini. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah yang relevan, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun laporan penelitian yang membahas secara langsung maupun tidak langsung hubungan antara nilai Pancasila dan praktik etika politik di Indonesia.

Seluruh data bersumber dari artikel terakreditasi yang terbit dalam rentang sepuluh tahun terakhir. Proses pencarian jurnal berlangsung melalui basis data akademik yang menyediakan publikasi bereputasi. Setiap artikel melalui tahap seleksi berdasarkan relevansi topik, kualitas publikasi, keterhubungan isi dengan persoalan kesenjangan nilai Pancasila serta praktik etika politik kontemporer.

Langkah analisis menggunakan penelaahan isi yang menekankan pendalaman konsep, temuan penelitian, pola argumentatif, corak pemikiran, serta kecenderungan

empiris yang muncul dalam berbagai publikasi. Hasil bacaan dibandingkan melalui proses identifikasi tema untuk memperoleh pemetaan masalah mencerminkan bentuk kesenjangan nilai dalam perilaku politik masa kini. Penjaminan validitas bersifat konseptual melalui penerapan standar pemilahan sumber ilmiah kredibel, pemeriksaan konsistensi informasi, evaluasi objektif terhadap argumen akademik, serta penekanan literatur memiliki landasan teori kuat.

Fokus penelitian berada pada ranah kajian kepustakaan tanpa pemakaian sumber lapangan. Struktur analisis menghasilkan uraian terarah yang menggambarkan hubungan antara nilai normatif Pancasila dengan kenyataan etika politik dalam konteks kontemporer.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Kesenjangan antara Nilai Pancasila dan Realitas Politik

a) Korupsi Politik (Bertentangan dengan Sila I, II, dan V)

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar dalam politik Indonesia. Korupsi merupakan persoalan yang sulit diberantas dan diatasi (Lamijan & Tohari, 2022).

Banyak pejabat publik, anggota legislatif, dan kepala daerah terjerat kasus korupsi setiap tahun. Tindakan ini bertentangan dengan nilai kejujuran, moralitas, serta keadilan sosial.

b) Politik Uang dalam Pemilu
(Bertentangan dengan Sila IV dan V)

Politik uang merusak prinsip demokrasi yang bersih. Pemilu menjadi ajang transaksi, bukan musyawarah yang berlandaskan hikmat kebijaksanaan {Citation} . Hal ini memperparah pragmatism politik dan memperlemah kualitas wakil rakyat. Kasus-kasus semacam ini kerap terjadi melalui pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan syarat mendukung calon tertentu, terutama menjelang hari pemungutan suara. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil sesuai amanat UUD 1945. Penegakan hukum untuk menindak politik uang diatur dalam UU Pemilu, seringkali terkendala lemahnya bukti dan kurangnya pengawasan ketat.

Bentuk politik uang terdiri dari penyuapan terhadap panjangnya prosedur dan antrian pelayanan publik, penyuapan terhadap pengawasan birokrasi public, dan

penyuapan untuk meningkatkan kekuasaan ekonomi, menjajakan pengaruh pejabat public untuk menjamin pelaksanaan pertukaran korupsi dari orang yang memberi suap, pembelian suara untuk mempertahankan kekuasaan partai politik, nepotisme atau patronage untuk mendapatkan pekerjaan tertentu, dan korupsi pembiayaan partai politik (*Article.Php*, n.d.).

Untuk memberantas korupsi politik maka perlu disusun Undang-Undang keuangan partai politik dan pendanaan kampanye sehingga terwujud suatu sistem keuangan partai politik dan pendanaan kampanye yang transparan dan akuntabel.

c) Politisasi Identitas dan Polarisasi
(Bertentangan dengan Sila III)

Elite politik kerap memanfaatkan isu SARA untuk meraih suara. praktik ini meningkatkan polarisasi sosial, memperlemah persatuan, dan mencederai nilai Pancasila.

d) Ujaran Kebencian dan Disinformasi Politik
(Bertentangan dengan Sila III dan IV)

Etika komunikasi politik di Indonesia masih rendah. Media sosial menjadi ruang penyebar hoaks dan ujaran kebencian oleh actor publik

maupun simpatisan. Hal ini mengganggu kualitas diskursus publik.

e) Penyalagunaan kekuasaan (bertentangan dengan sila v)

Praktik nepotisme, intervensi elite terhadap lembaga hukum, dan politik kartel memperlihatkan lemahnya integritas. Kekuasaan sering digunakan kepentingan kelompok, bukan kesejahteraan rakyat.

2. Faktor Penyebab Kesenjangan

Kesenjangan antara nilai normatif Pancasila dan praktik politik kontemporer Indonesia tidak muncul secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi faktor struktural, kultural, dan teknologis. Berdasarkan kajian literatur, sedikitnya terdapat sepuluh faktor utama yang memengaruhi terjadinya kesenjangan tersebut.

a. Budaya Politik yang Pragmatis

Politisasi kekuasaan lebih dominan dari politik berbasis nilai. Elite politik mengejar kepentingan jangka pendek, bukan kepentingan publik (Aspinall & Berenschot, 2019). Banyak penelitian menunjukkan bahwa budaya politik Indonesia didominasi orientasi kekuasaan dan transaksi kepentingan. Politik cenderung dijalankan secara

pragmatis, bukan berbasis nilai atau ideologi. Praktik politik uang, patronase, dan distribusi jabatan menunjukkan kuatnya orientasi kekuasaan dibanding pengabdian publik.

b. Lemahnya Internalisasi Nilai Pancasila

Pendidikan Pancasila bersifat formalistik dan belum membentuk karakter dalam kehidupan politik (Aspinall, 2020). Internalisasi nilai Pancasila masih bersifat formalistik dan kognitif, belum menyentuh ranah afektif dan praksis. Pendidikan Pancasila lebih banyak menekankan hafalan, bukan pembentukan karakter politik. Hal ini berdampak pada lemahnya penghayatan nilai etika ketika terjun dalam proses politik.

c. Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten

Hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketidakadilan ini melanggengkan pelanggaran etika. Kelemahan sistem penegakan hukum membuat pelanggaran etika dan korupsi politik terus berulang. Banyak studi menunjukkan bahwa "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas" masih terjadi, menimbulkan impunitas bagi elite politik. Hal ini melemahkan moralitas publik serta menghambat

terwujudnya sila keadilan sosial (Darma, 2023).

d. Kurangnya Keteladanan Elite Politik

Perilaku pemimpin menjadi contoh bagi Masyarakat. Minimnya keteladanan menyebabkan nilai Pancasila tidak menjadi panutan. Elite politik memiliki fungsi moral sebagai teladan masyarakat (Fadlail, 2024). Namun, studi-studi etika politik menyimpulkan bahwa banyak pemimpin justru terlibat korupsi, manipulasi informasi, atau praktik kekuasaan non-etis, sehingga masyarakat kehilangan model perilaku politik yang sesuai nilai Pancasila.

e. Pengaruh Media Sosial dan Polarisasi Digital

Media sosial memperkuat politik identitas, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks. Fenomena *post-truth* menyebabkan fakta sering dikalahkan opini emosional. Ruang digital memperdalam polarisasi, mengikis nilai persatuan (Sila III) dan musyawarah (Sila IV) (Hicken & Mujani, 2020). Media sosial mempercepat penyebaran hoaks, memperkuat *echo chamber*, dan memperkeruh etika politik.

3. Implikasi Kesenjangan terhadap Demokrasi Indonesia

Kesenjangan antara nilai normatif Pancasila dan realitas etika politik kontemporer membawa implikasi luas terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Implikasi tersebut tidak hanya bersifat politis, tetapi juga berdampak sosial, institusional, dan moral. Temuan dari berbagai penelitian memperlihatkan bahwa kesenjangan nilai yang terjadi secara berkelanjutan berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi dan melemahkan legitimasi negara.

1. Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan partai politik

Kesenjangan antara nilai ideal dan praktik politik, terutama korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi seperti partai politik, DPR, pemerintah, dan lembaga penegak hukum (Lamijan & Tohari, 2022). Turunnya *trust* publik merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan demokrasi, karena kepercayaan merupakan fondasi hubungan negara dengan warga.

2. Menurunnya kualitas demokrasi, seperti meningkatnya politik identitas dan melemahnya akuntabilitas.

Kegagalan menegakkan nilai persatuan (Sila III) dan nilai demokrasi yang berkeadaban (Sila IV) membuka ruang bagi politik identitas, yang memperdalam fragmentasi sosial (Levitsky & Ziblatt, 2018). Polarisasi yang meningkat, khususnya melalui media sosial, menciptakan segregasi politik dan menghambat dialog rasional antarwarga.

3. Terancamnya kohesi sosial akibat polarisasi dan disinformasi

Kegagalan menegakkan nilai persatuan (Sila III) dan nilai demokrasi yang berkeadaban (Sila IV) membuka ruang bagi politik identitas, memperdalam fragmentasi sosial (Lim, 2020). Polarisasi meningkat, khususnya melalui media sosial, menciptakan segregasi politik dan menghambat dialog rasional antarwarga.

4. Menguatnya oligarki politik dan melemahnya peran Masyarakat sipil

Ketika nilai Pancasila tidak diinternalisasi dalam keputusan publik, kebijakan yang dihasilkan

sering kali tidak berpihak pada rakyat banyak. Kebijakan menjadi elitis, tidak inklusif, dan kurang sensitif terhadap keadilan sosial. Hal ini memperlebar ketimpangan dan menurunkan efektivitas demokrasi sebagai sarana kesejahteraan.

4. Upaya Mengatasi Kesenjangan

- a. Reformasi Etika Politik Berbasis Pancasila Penguatan etika politik harus menjadi agenda nasional, termasuk dalam proses kaderisasi partai politik.
- b. Penegakan Hukum yang Adil dan Konsisten Konsisten penegakan hukum menjadi kunci untuk menekan pelanggaran etika dan korupsi.
- c. Penguatan Pendidikan Pancasila dan Karakter Pembelajaran Pancasila harus berbasis praktik nyata, bukan teori belaka.
- d. Literasi Digital untuk Mengurangi Polarisasi Masyarakat perlu memiliki kemampuan kritis dalam melengkapi disinformasi.
- e. Keteladanan Moral dari Pemimpin Pemimpin yang berintegritas menjadi faktor penentu terciptanya etika politik yang sehat.

D. Kesimpulan

Kesenjangan nilai Pancasila dengan praktik etika politik Indonesia menunjukkan lemahnya internalisasi nilai dasar pada perilaku elite serta mekanisme politik nasional. Realitas politik memperlihatkan dominasi pragmatisme, korupsi, disinformasi digital, serta penyalahgunaan kewenangan yang menghambat pembentukan etika publik. Kondisi tersebut menghasilkan penurunan kualitas demokrasi, erosi kepercayaan masyarakat, serta melemahnya orientasi moral dalam penyelenggaraan negara.

Temuan penelitian menegaskan urgensi penguatan etika politik berbasis Pancasila melalui peningkatan kualitas pendidikan nilai, penegakan hukum yang tegas, serta pembentukan kepemimpinan berintegritas. Pancasila tetap memiliki posisi fundamental sebagai landasan normatif kehidupan politik Indonesia. Implementasi konsisten berpotensi memperbaiki integritas demokrasi, dan memperkuat orientasi etis dalam kehidupan berbangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z., Siahaan, S. A. P., & Setiawan, S. (2025). PANCASILA PEDOMAN MORAL DAN SISTEM FILSAFAT BANGSA: PANCASILA PEDOMAN MORAL DAN SISTEM FILSAFAT BANGSA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 514-523.
- Fadlail, A. (2024). Demokrasi Pancasila: Landasan nilai dan prinsipnya dalam membangun sistem dan etika politik Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 403-413.
- Alim, M. S. (2024). *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. Mega Press Nusantara.
- Mimin Ninawati, S. E. (2025). *Fenomena Politik Indonesia Perspektif Sejarah, Sosial dan Budaya*. Madani Kreatif Publisher.
- Vinanda, O. R., Koza, A., Fatikasari, D. A., malik Ibrahim, M., & Putri, S. (2025). DEMOKRATISASI DAN TANTANGAN POLITIK IDENTITAS DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA KONTEMPORER. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9988-9994.
- Mahroza, D. (2024). ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA POLITIK UANG PADA PEMILU PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK, HUKUM DAN BUDAYA. *Ilmu Dan Budaya*, 45(2).
- Heriyudananta, M. (2021). Analisis kompetensi menulis karya tulis ilmiah mahasiswa di Indonesia. *Ascarya: Journal of*

- Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(1), 47-55.
- Sukmana, O., Pirandy, G., Machdum, S. V., Pujiriyani, D. W., Hisyam, C. J., Berlianti, B., ... & Afifah, A. (2025). *Sosiologi Masalah Sosial: Teori, Analisis, dan Praktik Penanggulangan*. Star Digital Publishing.
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(02), 40-59.
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik uang dalam pemilihan umum: Kajian perspektif demokrasi dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2), 49-62.
- HARAHAP, N. A. (2025). *PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Fachrudin, A. (2021). *Konflik Politik Identitas: Pergumulan Politik, Agama dan Media Dari Pilkada DKI 2017 Hingga Pilpres 2019*. Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo).
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Badruli, M. (2015). Internalisasi Nilai Pendidikan Kewarganegaran Pada Pendidikan Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(2), 98-107.
- Putra, H. A. F., Bangun, J. A. C., Pradipta, F. S., & Sari, E. K. (2025). Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 983-990.
- Nuradhawati, R., & Rahmandika, M. A. (2025). *Etika Kepemimpinan Dalam Pemerintahan: Membangun Integritas dan Kepercayaan Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU: (Studi Kasus Pilgub DKI 2017). *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Prihatin, E., Kadarsah, D., & IZFS, R. D. (2025). *Kebijakan Pendidikan Nasional: Transformasi Digital untuk Sistem yang Inklusif*. Indonesia Emas Group.
- Hadi, F., & Gandryani, F. (2024). Penguatan Kaderisasi Partai Politik Melalui Pemberlakuan Syarat Masa Keanggotaan Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), 157-179.
- Awaludin, A., Randiana, P., Lambouw, G. A. P., Suhendi, A., Wiradirja, I. R., & Haspada, D.

(2025). Realitas dan Idealitas dalam Penegakan Hukum di Era Kegundahan Politik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4212-4220.

Rini, W. A., Soinbala, N. C., & Arifianto, Y. A. (2024). Efektivitas kepemimpinan Kristen yang berintegritas: Sebuah perspektif etis-teologis. *Jurnal Teruna Bhakti*, 7(1), 39-49.